



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Tim Penerapan SPM adalah Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

10. Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan operasional dalam upaya pencapaian target SPM oleh Pemerintah Provinsi untuk periode 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam:
- a. menerapkan SPM Urusan Pemerintahan Wajib;
 - b. menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. menjamin hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan dasar secara minimal dan bermutu.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:
- a. memastikan kualitas dan mutu Pelayanan Dasar;
 - b. mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan;
 - c. menciptakan kesatuan langkah dan pelaporan; dan
 - d. menjamin aksesibilitas Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (2) Ketentuan mengenai penjabaran atas sistematika Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Provinsi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025- 2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan SPM.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan pada sekretariat bersama di tingkat pusat.
- (2) Laporan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas tata pemerintahan Provinsi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini. Semoga Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3 Kondisi Umum Wilayah.....	5
1.3.1 Luas Wilayah dan Batasan Wilayah.....	5
1.3.2 Topografi.....	6
1.3.3 Hidrologi.....	9
1.3.4 Demografi.....	13
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana.....	13
1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	21
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	26
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM.....	26
2.1.1 Bidang Pendidikan.....	26
2.1.2 Bidang Kesehatan.....	27
2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum	28
2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat.....	29
2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	30
2.1.6 Bidang Sosial.....	31
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	32
2.2.1 Bidang Pendidikan.....	32
2.2.2 Bidang Kesehatan.....	33
2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum	34
2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat.....	35
2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	36
2.2.6 Bidang Sosial.....	37
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	39
3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi.....	39
3.1.1 Bidang Pendidikan.....	39
3.1.2 Bidang Kesehatan.....	40
3.1.3 Bidang Pekerjaan Umum	42
3.1.4 Bidang Perumahan Rakyat.....	43

3.1.5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	45
3.1.6	Bidang Sosial.....	46
3.2	Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM	54
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
PENERAPAN SPM.....		185
4.1	Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	185
4.2	Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM.....	190
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		192
5.1	Kesimpulan.....	192
5.2	Saran	193

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warganya baik itu kebutuhan dasar maupun hak sipil sebagai warga negara. Hal ini diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dibentuknya pemerintah di negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia harus berupaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar warganya dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan, kebijakan, inovasi bahkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga. Bahkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa prioritas negara bukan lagi hanya kinerja Pemerintah saja, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar, Penerapan dan Pelaporan SPM, Pembinaan dan Pengawasan SPM, dan ketentuan lain diantaranya yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Hal ini secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang bahkan mengamanatkan bahwa dokumen rencana dimaksud harus dimuat dalam RPJMD dan RKPD. Merujuk pada ketentuan-ketentuan

dimaksud dan sebagai bentuk komitmen dalam penerapan SPM, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah pengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam melaksanakan program, penganggaran, pengawasan dan evaluasi kegiatan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Melalui rencana aksi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban negara secara optimal khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan SPM di Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta sinkronisasi dan koordinasi dalam penerapan SPM Daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Adapun tujuan Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah untuk mewujudkan penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan sasaran Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1.3 Kondisi Umum Wilayah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°- 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi :

1. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
2. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
3. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
4. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 Km² dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM ²
1	OGAN KOMERING ULU	3.774,497
2	OGAN KOMERING ILIR	17.071,333
3	MUARA ENIM	6.763,912
4	LAHAT	4.333,065
5	MUSI RAWAS	6.122,588
6	MUSI BANYUASIN	14.550,788
7	BANYUASIN	12.262,756
8	OKU TIMUR	3.412,716
9	OKU SELATAN	4.369,252
10	OGAN ILIR	2.302,858
11	EMPAT LAWANG	2.234,097
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.842,563
13	MUSI RAWAS UTARA	5.937,803
14	PALEMBANG	352,506
15	PAGAR ALAM	625,913
16	LUBUK LINGGAU	367,726
17	PRABUMULIH	447,311

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

1.3.2 Topografi

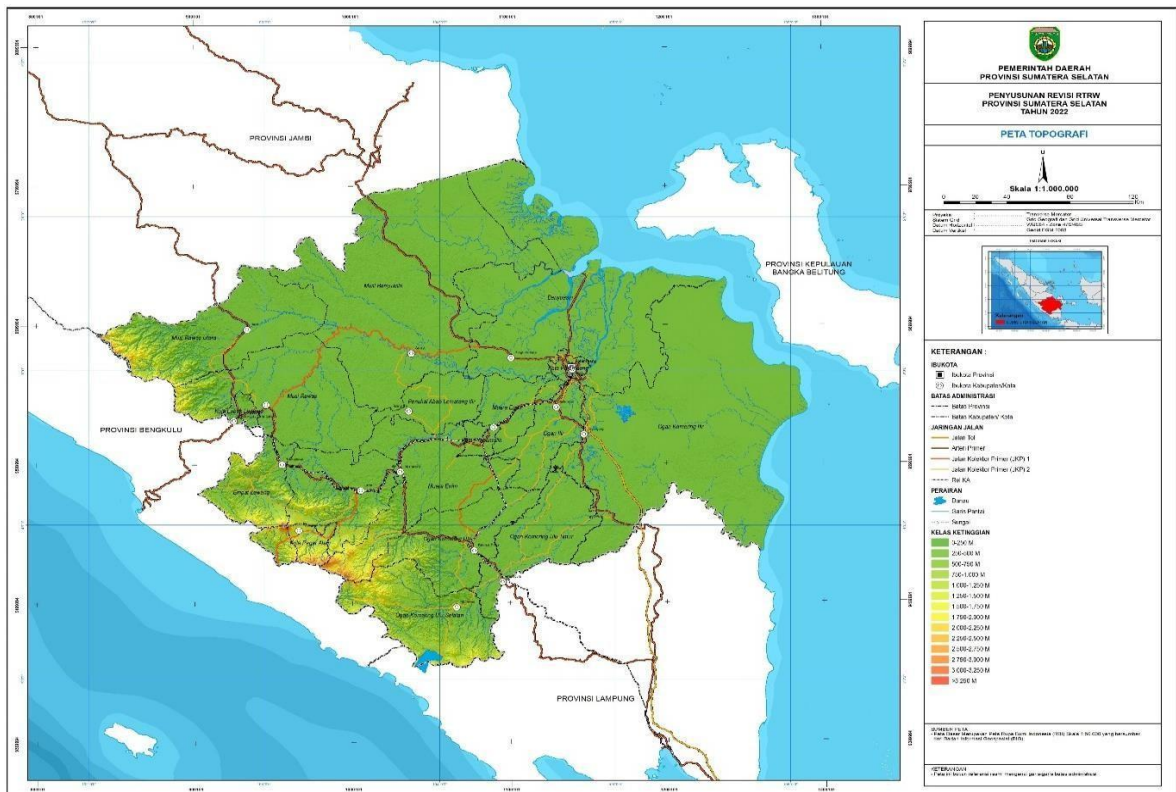
Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 80-3.162 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebanyak 85% wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada pada ketinggian rata-rata antara 250-500 mdpl pada bagian tengah sampai ke wilayah pesisir di bagian utara. Salah satu kota dengan topografi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Pagar Alam dengan titik tertinggi berada di puncak Gunung Dempo (3.173 mdpl), diikuti oleh Gunung Bungbuk dengan ketinggian 2.125 mdpl, kemudian Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl. Wilayah Timur merupakan daerah pantai yang terdiri dari rawa dan perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasi di wilayah timur berupa tumbuhan Palmase dan kayu rawa (Bakau).

Tabel 1.2 Ketinggian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Ketinggian (ha)				
		Sangat Rendah 0-600 mdpl	Rendah 600-1.200 mdpl	Sedang 1200- 1.800 mdpl	Cukup Tinggi 1.800- 2.400mdpl	Tinggi 2.400- 3.300 mdpl
1	Ogan Komering Ulu	346.489,82	25.422,91	4.928,22	608,74	-
2	Ogan Komering Ilir	1.706.898,63	-	-	-	-
3	Muara Enim	580.795,50	35.524,63	37.245,43	20.273,62	2.551,99

No	Kabupaten/Kota	Luas Ketinggian (ha)				
		Sangat Rendah 0-600 mdpl	Rendah 600-1.200 mdpl	Sedang 1200- 1.800 mdpl	Cukup Tinggi 1.800- 2.400mdpl	Tinggi 2.400- 3.300 mdpl
4	Lahat	291.438,92	104.124,50	33.486,69	3.046,27	1.210,08
5	Musi Rawas	570.783,52	26.879,07	14.082,15	514,03	-
6	Musi Banyuasin	1.455.078,76	-	-	-	-
7	Banyuasin	1.226.275,57	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	242.100,98	154.554,61	36.180,42	4.007,24	81,95
9	Ogan Komering Ulu Timur	341.271,62	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	230.285,79	-	-	-	-
11	Empat Lawang	139.942,69	62.433,66	18.797,90	2.076,21	159,22
12	Penukal Abab Lematang Ilir	184.256,33	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	487.164,66	66.845,60	33.526,70	6.243,34	-
14	Kota Palembang	35.250,59	-	-	-	-
15	Kota Prabumulih	44.731,12	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	2.133,43	32.137,05	18.294,04	7.616,65	2.410,14
17	Kota Lubuklinggau	36.753,03	19,53	-	-	-
Sumatera Selatan		7.921.650,97	507.941,57	196.541,55	44.386,10	6.413,37

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

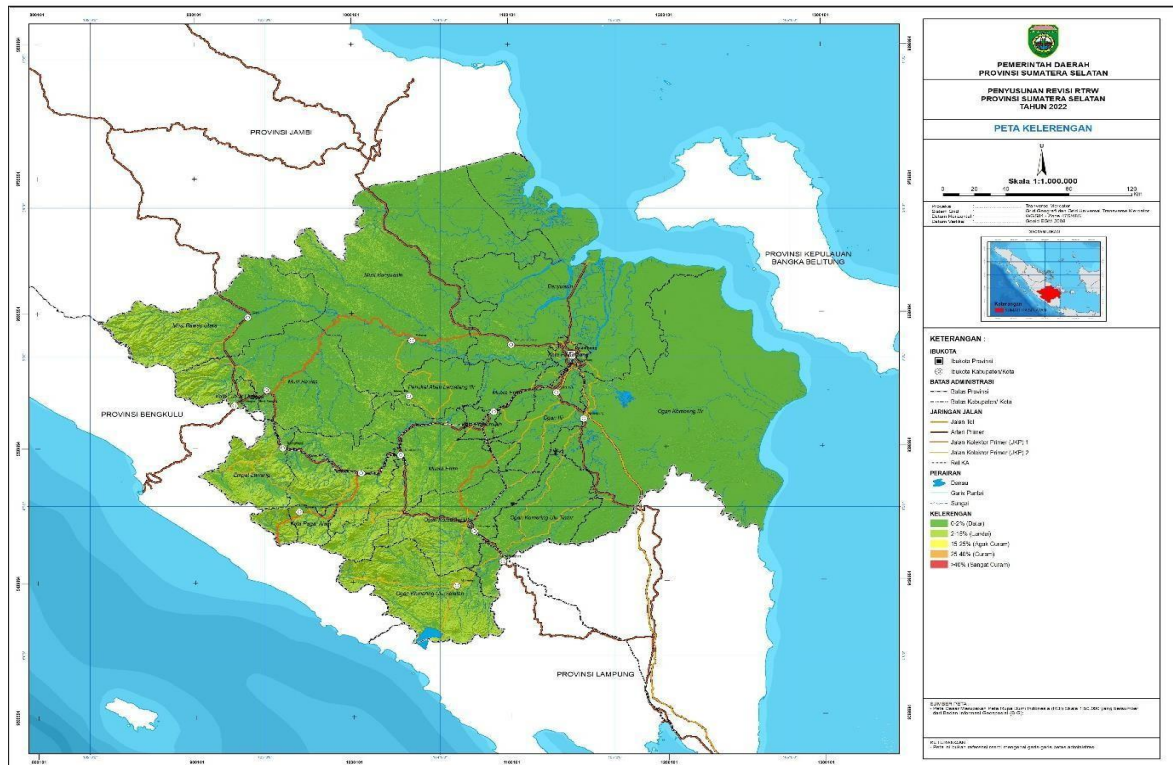


Gambar 1.1 Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Kelas kelerengan Provinsi Sumatera Selatan dibagi ke dalam lima kelas kelerengan berupa kelas datar dengan kemiringan 0-2%, landai dengan kemiringan 2-15%, agak curam dengan kemiringan 15-25%, curam dengan kemiringan 25-40%, dan sangat curam dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%. Berdasarkan data olah spasial, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kelas kelerengan datar (0-2%) sebesar

78,65% atau seluas 6.825.713,57 ha. Sementara kelas lereng sangat curam dengan kelas lereng >40% hanya sebesar 144,09 ha yang tersebar di wilayah selatan.



Gambar 1.2 Peta Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Tabel 1.3 Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Kelerengan (ha)				
		Datar (0-2%)	Landai (2-15%)	Agak Curam (15-25%)	Curam (25-40%)	Sangat Curam >40%
1	Ogan Komering Ulu	213.472,03	163.237,14	668,30	65,26	6,95
2	Ogan Komering Ilir	1.696.036,40	10.862,23	-	-	-
3	Muara Enim	474.946,94	200.410,07	988,16	43,54	2,45
4	Lahat	173.121,10	257.689,94	2.401,72	92,53	1,16
5	Musi Rawas	468.069,12	141.229,81	2.545,34	380,40	34,10
6	Musi Banyuasin	1.301.832,76	153.245,79	0,20	-	-
7	Banyuasin	1.206.317,14	19.958,07	0,36	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	93.500,65	340.940,58	2.349,22	127,18	7,57
9	Ogan Komering Ulu Timur	319.074,75	22.189,82	7,05	-	-
10	Ogan Ilir	226.752,83	3.532,96	-	-	-
11	Empat Lawang	58.885,06	163.065,17	1.337,14	102,13	20,17
12	Penukal Abab Lematang Ilir	168.541,75	15.714,58	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	312.210,67	276.781,70	4.233,41	484,48	70,04
14	Kota Palembang	34.740,51	510,09	-	-	-
15	Kota Prabumulih	42.140,40	2.590,71	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	14.790,54	47.187,79	568,32	43,02	1,64
17	Kota Lubuklinggau	21.280,92	15.480,77	8,67	2,20	-
Sumatera Selatan		6.825.713,57	1.834.627,24	15.107,90	1.340,75	144,09

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

1.3.3 Hidrologi

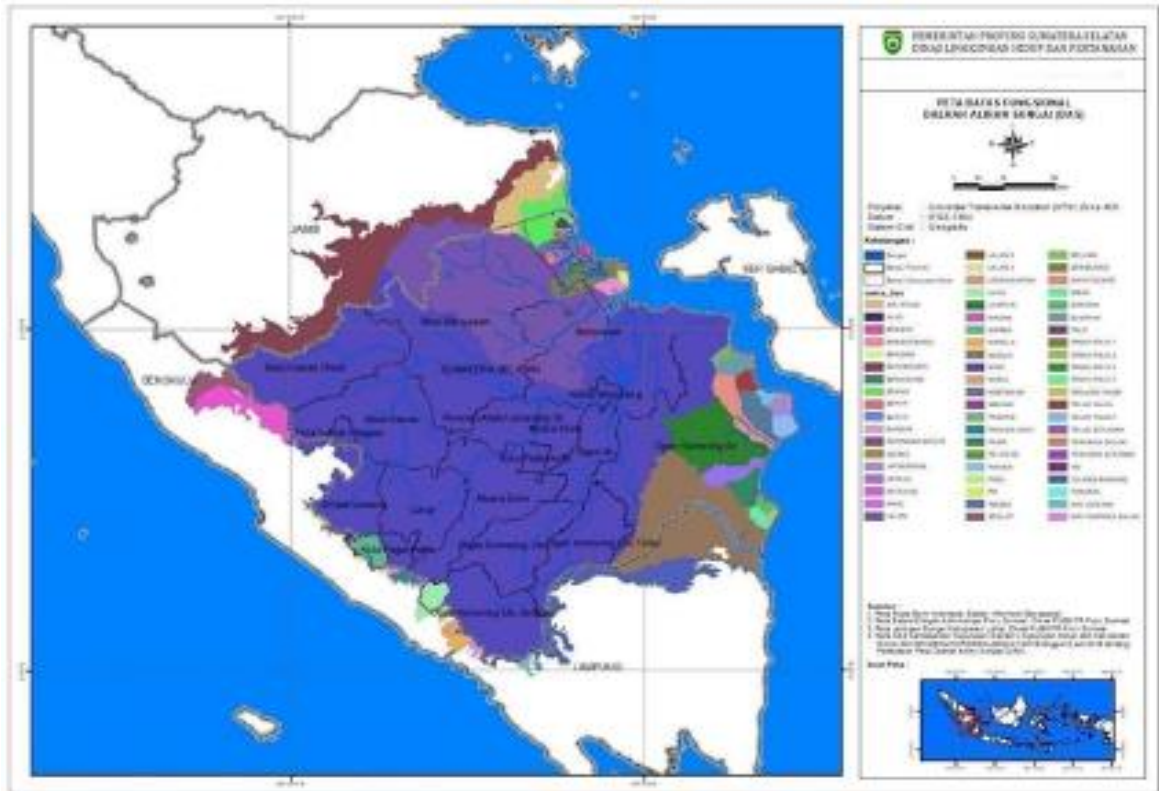
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumber daya air. Sumber daya air dibedakan menjadi sumber daya permukaan dan air tanah. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama. Terdapat sembilan sungai besar atau sungai utama di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus, Sungai Lematang, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Batanghari Leko (atau dikenal juga dengan sebutan Batanghari Sembilan). Sebagian besar sungai-sungai di Provinsi Sumatera Selatan bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan, dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit, dan Sungai Rawas.

Air sungai di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung. Endapan muncul karena kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan yang menyebabkan terjadinya erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan pendangkalan dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Ketersediaan air permukaan di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi keberadaan lebak, embung, dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Selain sungai, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumberdaya air berupa rawa dan danau. Daerah rawa terdapat di dataran rendah berupa rawa lebak dan rawa pasang surut. Sedangkan danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Danau Air Hitam, Danau Ranau, Danau Matana, dan Danau Jembawan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS) meliputi WS Batanghari, WS Bengkulu-Alas- Talo, WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Musi-Sugihan-Banyuasin, WS Nasai-Padang- Guci,

WS Sebelat-Ketahun-Legi, dan WS Semangka. 7 (tujuh) Wilayah sungai tersebut terbagi kedalam 50 (lima puluh) Daerah Aliran Sungai (DAS), dan secara fungsional wilayahnya terbagi dalam 62 (enam puluh dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yang tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan. Untuk lebih jelasnya mengenai Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.7



**Gambar 1.3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)
Provinsi Sumatera Selatan**

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Secara fungsional ada 22 (dua puluh dua) DAS yang melintas batas wilayah administrasi provinsi lain, yaitu:

- 1) DAS Air Hitam melintasi sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai hulunya berada di Kabupaten Banyuasin dan hilirnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- 2) DAS Alas melintasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagai hulu dan Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma merupakan bagian hilir.
- 3) Hulu DAS Bangkenang berada pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Tanjung Sakti, serta melintasi Kabupaten Kaur dan hilirnya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Kedurang yang merupakan wilayah Provinsi Bengkulu.

- 4) Hulu DAS Batanghari melintasi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, serta melintasi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi dan bermuara di Kabupaten Tanjung Jabung tepatnya di Kecamatan Nipah Panjang Provinsi Jambi.
- 5) DAS Benuh melintasi Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan hulu DAS Benuh dan bermuara pada Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) DAS Ketahun melintasi wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sebagai hulu DASnya dan bermuara di Provinsi Bengkulu di Kabupaten Lebong.
- 7) DAS Kinal melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hulu dari DAS Kinal ini, serta bermuara di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 8) Hulu DAS Lalan berlokasi di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan melintasi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta bermuara pada Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 9) Hulu DAS Luas berlokasi di Kabupaten Lahat dan melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, serta bermuara di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 10) Hulu DAS Manna berlokasi Kabupaten Empat Lawang dan melintasi Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hilir di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 11) Hulu DAS Manula berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan melintasi Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan hilir di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- 12) Hulu DAS Mesuji berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan hilir di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Juga di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

- 13) DAS Musi yang merupakan DAS terbanyak melintas pada sebagian besar wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dimana hulu DAS ini berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, melintas juga di Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung dan bermuara di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- 14) Hulu DAS Nasal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan hilir di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 15) Hulu DAS Padang Guci berada pada wilayah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dan bermuara pada Kabupaten Kedurang Provinsi Bengkulu.
- 16) DAS Pino, hulu DAS ini berada pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Empat Lawang tepatnya di kecamatan Tanjung Sakti, melintasi Kabupaten Bengkulu Selatan dan bermuara di Kabupaten Selema Provinsi Bengkulu.
- 17) DAS Seblat, hulu DAS ini berada di Kabupaten Merangi Kecamatan Jangkat Provinsi Jambi, melintasi juga Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan bermuara ke Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu di Kecamatan Lebong Utara.
- 18) DAS Seluma melintasi wilayah Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang merupakan bagian hulu, melintasi juga di wilayah Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan berhilir di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 19) DAS Talo melintasi wilayah Kecamatan Pasemah Air Keruh dan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian hulu, serta memiliki hilir di Kabupaten Seluma yang merupakan bagian wilayah Provinsi Bengkulu.
- 20) DAS Tulang Bawang melintasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan bagian hulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, serta melintasi juga pada wilayah Kabupaten Waykanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan bermuara di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan wilayah yang ada di Provinsi Lampung.
- 21) DAS Way Semaka memiliki hulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, serta melintasi wilayah yang ada di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian hilir.

22) DAS Way Simpang Balak memiliki hulu pada Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, melintasi wilayah Provinsi Lampung, dan bermuara di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

1.3.4 Demografi

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86.771,684 Km² didiami penduduk pada tahun 2024 semester II (31 Desember 2024) sebanyak 9.064.690 jiwa.

Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten/Kota, 241 Kecamatan, 403 Kelurahan dan 2.856 Desa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang sebanyak 1.801.367 Jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 153.271 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 4.616.445 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.448.245 jiwa sebagaimana tertera pada tabel dibawah :

Tabel 1.4 Rekapitulasi Data Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	JML KEC.	JML DESA/KEL.	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	390.048	119.073
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	801.059	260.106
3	MUARA ENIM	22	255	653.731	203.222
4	LAHAT	24	377	448.141	140.249
5	MUSI RAWAS	14	199	427.723	136.675
6	MUSI BANYUASIN	15	240	736.897	227.974
7	BANYUASIN	21	304	888.324	280.479
8	OKU TIMUR	20	312	694.832	220.969
9	OKU SELATAN	19	259	406.938	125.079
10	OGAN ILIR	16	241	446.020	137.939
11	EMPAT LAWANG	10	156	336.783	109.954
12	PALI	5	71	214.795	64.842
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	203.688	63.464
14	PALEMBANG	18	107	1.801.367	543.285
15	PAGAR ALAM	5	35	153.271	46.857
16	LUBUK LINGGAU	8	72	247.550	76.134
17	PRABUMULIH	6	37	213.523	64.272
	JUMLAH	241	3.258	9.064.690	2.820.573

SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

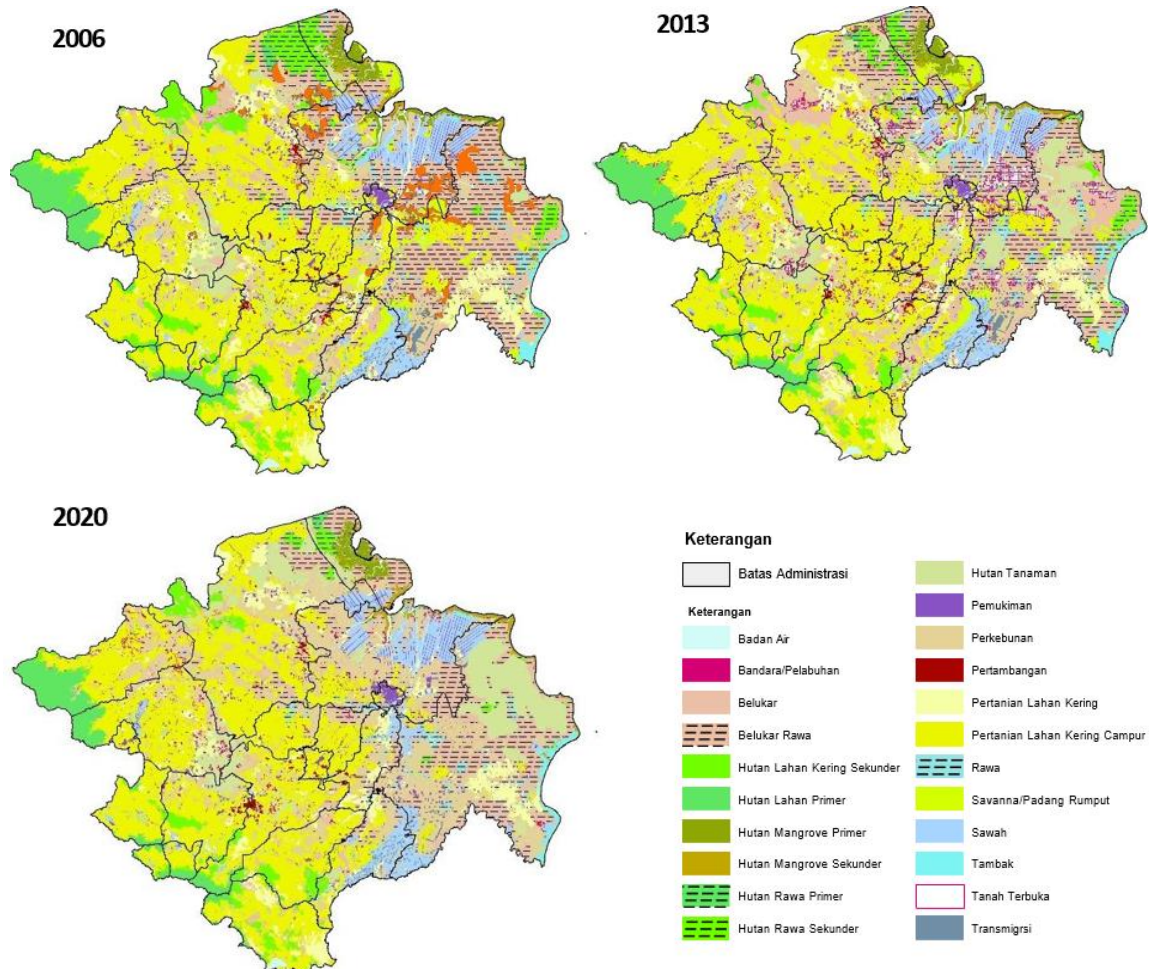
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim ditandai dengan berbagai fenomena hidrometeorologis atau bencana yang terjadi di atmosfer, air dan lautan. Dengan meningkatnya pelepasan emisi di atmosfer, maka mengakibatkan perubahan pada proses alami yang terjadi di air dan lautan, termasuk meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi.

2. Sumbangan Emisi Berbasis Lahan

Salah satu sumbangan terbesar emisi di Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan. Hal ini terjadi ketika terdapat alih fungsi lahan dari suatu tutupan lahan dengan cadangan karbon yang tinggi ke tutupan lahan dengan cadangan yang lebih rendah.



Gambar 1.4 Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2006, 2013, 2020

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

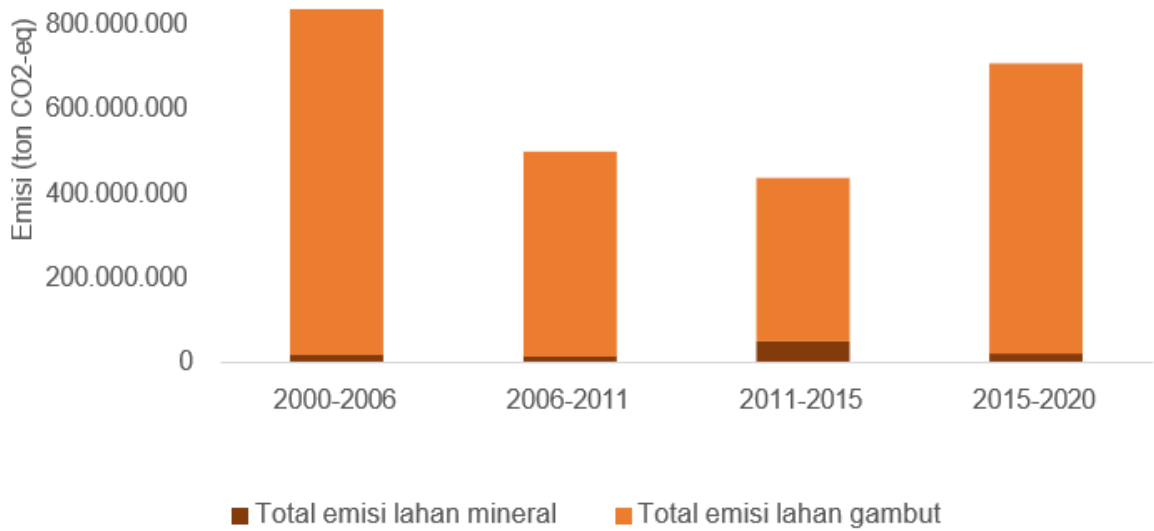
Secara historis, analisis data dari KLHS untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006, 2013 dan 2020 menunjukkan adanya perbedaan signifikan untuk beberapa tutupan lahan. Salah satu alih fungsi lahan yang perlu menjadi perhatian adalah pada penurunan tutupan lahan hutan. Beberapa kabupaten dengan tingkat penurunan tutupan lahan hutan tinggi adalah Ogan Komering Ilir, Musi Bayuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Tabel 1.5 Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020

No	Tutupan lahan	Luas (ha)			Luas Perubahan Tutupan Lahan 2006-2020 (ha)
		Tahun 2006	Tahun 2013	Tahun 2020	
1	Perkebunan	677.683,00	778.343,35	1.393.055,72	715.372,72
2	Hutan Tanaman	259.745,00	424.527,66	726.660,00	466.915,00
3	Sawah	412.330,00	402.795,08	500.453,44	88.123,44
4	Pertanian Lahan Kering Campur	2.857.434,00	2.841.779,84	2.920.091,62	62.657,62
5	Hutan Mangrove Sekunder	57.550,00	67.563,99	81.757,25	24.207,25
6	Badan Air	80.084,00	94.313,52	89.651,84	9.567,84
7	Pemukiman	166.888,00	168.441,96	172.254,55	5.366,55
8	Pertambangan	28.362,00	28.194,75	33.653,19	5.291,19
9	Hutan Lahan Primer	293.434,00	296.455,88	298.510,98	5.076,98
10	Bandara/Pelabuhan	232,00	247,26	549,81	317,81
11	Tambak	59.266,00	59.703,47	57.275,98	-1.990,02
12	Hutan Rawa Primer	18.414,00	9.069,23	10.267,17	-8.146,83
13	Transmigrasi	55.482,00	55.164,00	42.943,94	-12.538,06
14	Pertanian Lahan Kering	558.544,00	549.699,27	521.286,41	-37.257,59
15	Hutan Mangrove Primer	116.570,00	101.170,37	76.094,01	-40.475,99
16	Rawa	144.226,00	153.354,39	97.841,19	-46.384,81
17	Hutan Lahan Kering Sekunder	386.961,00	273.826,25	264.552,66	-122.408,34
18	Belukar	434.659,00	619.556,55	279.070,45	-155.588,55
19	Hutan Rawa Sekunder	227.987,00	163.228,70	65.763,02	-162.223,98
20	Savanna/Padang Rumput	217.377,00	236.506,69	396,07	-216.980,93
21	Tanah Terbuka	315.843,00	297.117,63	50.648,69	-265.194,31
22	Belukar Rawa	1.325.861,00	1.047.512,18	996.118,45	-329.742,55

Sumber: KLHS RTRW Sumatera Selatan 2024-2044

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di atas, sebagian besar emisi yang dihasilkan di Sumatera Selatan selama tahun 2000-2020 berasal dari emisi lahan gambut. Hal ini diakibatkan oleh potensi emisi lahan gambut yang bukan hanya berasal dari adanya alih fungsi tutupan lahan, namun juga berasal dari emisi yang dihasilkan dari ekosistem gambut itu sendiri. Jenis perubahan tutupan lahan yang berkontribusi terhadap pelepasan emisi terbesar dapat dilihat pada Gambar 2. Alih fungsi dari semak belukar rawa ke hutan tanaman menyumbang pelepasan emisi terbesar pada kurun waktu 2000–2020.



Gambar 1.5 Emisi Berbasis Lahan Historis Sumatera Selatan Tahun 2000-2020



Gambar 1.6 Lima Jenis Alih Fungsi Historis dengan Nilai Emisi Terbesar di Sumatera Selatan

3. Bencana Hidrometeorologi

Banyak kejadian bencana yang dialami Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun terakhir, diantaranya kekeringan, suhu ekstrem, banjir, karhutla, dan kerawanan pangan, sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim. Dilihat dari capaian Indeks Risiko Bencana, Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015-2022, namun masih masuk kategori tinggi sehingga perlu penanganan berupa perencanaan pembangunan yang berorientasi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa kabupaten dengan risiko paling tinggi adalah Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim dan Musi Rawas. Adapun isu yang perlu diatasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertanian, serta pekerja keluarga, terutama perempuan.

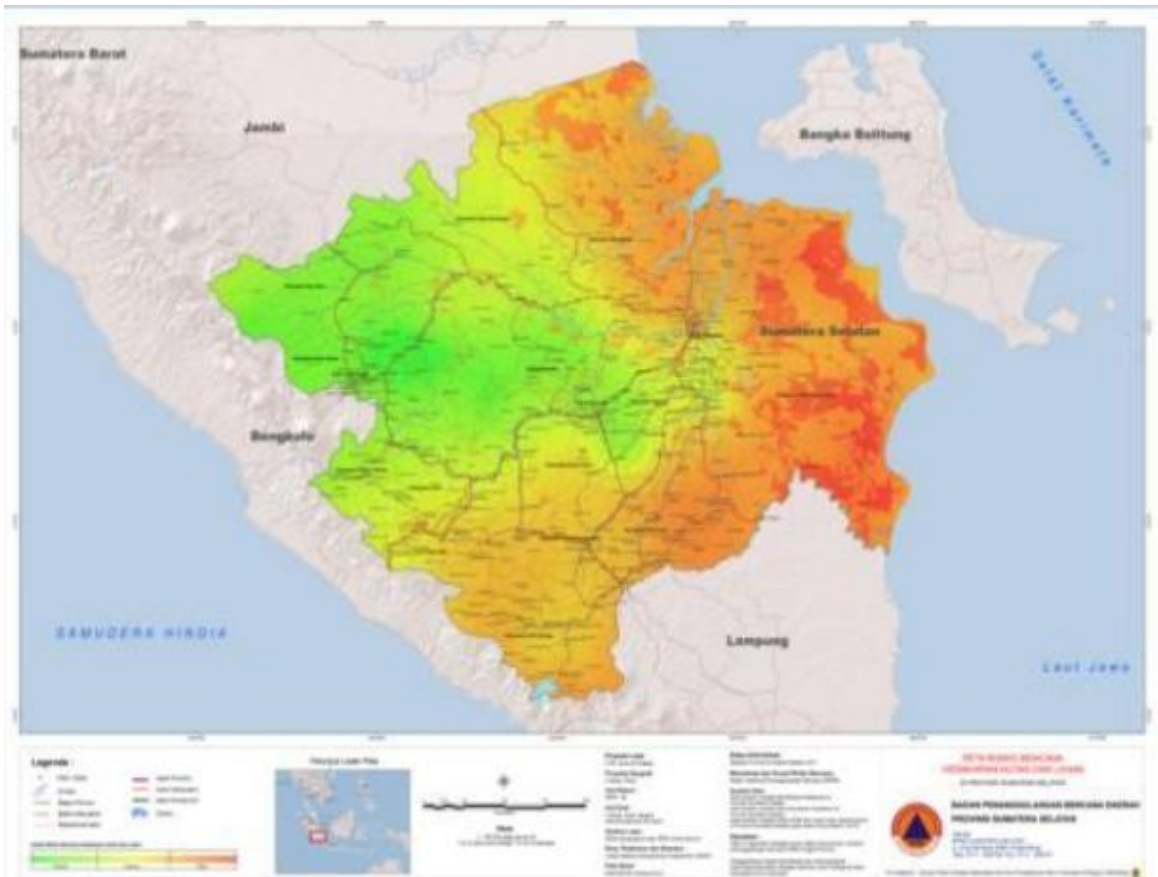
4. Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga Tahun 2023 tercatat 364 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi:

1. Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batanghari Leko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi;
2. Di Sub DAS Rawas banjir terjadi di Bingin Teluk dan Noman;
3. Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam;
4. Di Sub DAS Ogan banjir terjadi di Muara Kuang;
5. Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua;
6. Di pertemuan Sungai Musi-Sungai Kelingi, Sungai Musi-Sungai Lakitan dan Sungai Musi-Sungai Rawas terjadi pada saat debit air sedang tinggi di sungai-sungai;
7. Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah seluas 8.851.703,00 ha dan berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.319.835,00 ha, kelas sedang 3.249.973,00 ha, dan kelas tinggi dengan luas 3.281.895,00 ha. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 381.050,00 ha, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 673.019,00 ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 1.258.461,00 ha. Kejadian bencana alam cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 81, meningkat menjadi 201 di tahun 2023. Bencana alam terbanyak sepanjang tahun 2023 adalah kebakaran hutan, kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim El-Nino yang berdampak pada musim kering yang lebih lama sehingga mendorong terjadinya kebakaran hutan.



Gambar 1.7 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Dalam interval 20 tahun terakhir, kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi berada pada tahun 2017 dengan total luasan 727.174 ha. Pada rentang waktu 2020-2023, kejadian kebakaran mengalami peningkatan secara signifikan. Meski demikian, kebakaran yang terjadi paling parah berada pada area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), terutama pada tahun 2015 dan 2019. Selain itu, selama 2006-2021 areal terbakar banyak terjadi secara berulang di lokasi yang sama, yakni daerah Timur Provinsi Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Akibat adanya kebakaran pada lahan gambut, maka terjadi peningkatan kerusakan ekosistem gambut, terutama pada areal konsesi, baik HTI dan HGU.

Tabel 1.6 Bencana Alam di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	4	9	12	36
Banjir	39	38	37	118
Kebakaran hutan	24	32	126	315
Angin Puting Beliung	24	26	26	19
Total	91	105	201	488

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023; BMKG Sumsel 2024

6. Cuaca Ekstrem

Total luas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 ha. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas tinggi seluas 3.602.047,00 ha, kelas rendah seluas 21,00 ha, dan kelas sedang seluas 2.737.388,00 ha. Selain itu, total luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 8.853.691,00 ha dan berada pada kelas Sedang. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah 1.171.586,00 ha, kelas sedang seluas 7.676.694,00 ha, dan kelas tinggi seluas 5.411,00 ha.



**Gambar 1.8 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem
Provinsi Sumatera Selatan**

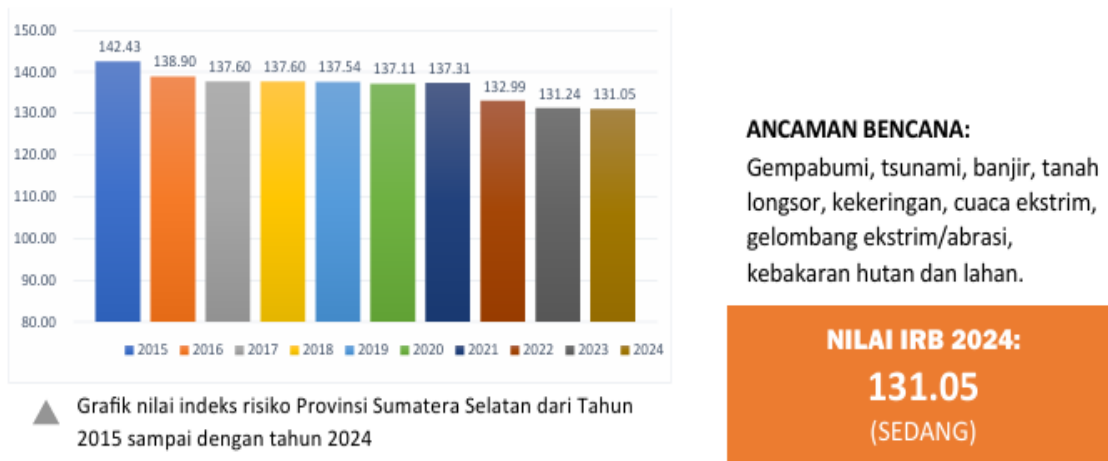
Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sebaran luas bahaya kekeringan masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas rendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu 1.007.667,00 ha, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 1.405.948,00 ha, dan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya kekeringan dengan kelas tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 5.411,00 ha.

7. Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

Indeks risiko bencana diformulasikan dengan memperhitungkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 pada Provinsi Sumatera Selatan memiliki kelas risiko Sedang dengan nilai 131,05.



Gambar 1.9 Grafik Nilai IRBI Sumsel tahun 2015 – 2024

Sumber : Buku IRBI 2024 BNPB

Untuk mengantisipasi risiko bencana yang mengancam Sumatera Selatan, baik bencana alam (seperti banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi susulan), bencana non-alam (seperti gagal teknologi di kawasan industri, wabah penyakit, atau kecelakaan transportasi), maupun bencana sosial (seperti konflik komunal atau kerusuhan), Pemerintah Provinsi beserta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya ini mencakup pemutakhiran peta risiko bencana secara menyeluruh, penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk berbagai jenis ancaman, peningkatan kapasitas tanggap darurat BPBD dan relawan, pelaksanaan simulasi bencana secara rutin, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang langkah evakuasi dan penanganan darurat, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI/Polri, untuk memastikan respons yang cepat, terpadu, dan efektif guna meminimalkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan gangguan sosial, sekaligus membangun ketangguhan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.

1.3.6 Fokus Kesehtraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2025, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp454,61 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp493,64 triliun pada tahun 2021, Rp590,08 triliun pada tahun 2022, Rp629,17 triliun pada tahun 2023, hingga mencapai Rp663,96 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini berarti dalam kurun waktu lima tahun tersebut, PDRB Provinsi Sumatera Selatan bertambah sebesar Rp209,35 triliun atau mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 46,05 persen. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan nilai tambah yang semakin besar dari tahun ke tahun, meskipun dinamika ekonomi global dan nasional menghadirkan berbagai tantangan.

Struktur PDRB tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar Rp163,34 triliun atau 24,60 persen terhadap total PDRB. Subsektor terbesar di dalamnya adalah pertambangan batubara dan lignit yang mencapai Rp92,14 triliun, diikuti pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar Rp38,94 triliun, serta pertambangan dan penggalian lainnya sebesar Rp32,25 triliun. Sektor ini menunjukkan peran strategis Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil komoditas energi, meskipun pada tahun 2024 nilainya mengalami sedikit penurunan dibandingkan 2023 akibat fluktuasi harga global dan permintaan pasar.

Sektor industri pengolahan berada pada posisi kedua dengan kontribusi sebesar Rp121,33 triliun atau 18,27 persen terhadap PDRB. Industri makanan dan minuman menjadi subsektor terbesar dengan nilai Rp62,76 triliun pada tahun 2024, meningkat hampir 40 persen dibandingkan nilai pada tahun 2020 yang sebesar Rp44,83 triliun. Industri pengolahan lainnya yang juga memberikan kontribusi signifikan adalah industri karet serta barang dari karet dan plastik sebesar Rp13,61 triliun, industri kimia dan farmasi sebesar Rp9,16 triliun, serta industri kertas dan barang dari kertas sebesar Rp8,92 triliun. Pertumbuhan industri pengolahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan

kapasitas produksi, tetapi juga mengindikasikan adanya perbaikan nilai tambah dari sektor hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB dengan nilai Rp90,05 triliun atau 13,56 persen pada tahun 2024. Di dalamnya, subsektor tanaman perkebunan menempati posisi dominan dengan nilai Rp34,64 triliun, naik signifikan dari Rp21,52 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh peran kelapa sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya yang memiliki pangsa pasar ekspor maupun domestik yang kuat. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mencapai Rp63,91 triliun, sedangkan subsektor kehutanan dan penebangan kayu mencatat Rp9,27 triliun, dan subsektor perikanan mencatat Rp16,86 triliun.

Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor mencatat nilai Rp91,96 triliun atau 13,85 persen dari total PDRB tahun 2024, menunjukkan kuatnya aktivitas distribusi barang dan perdagangan di wilayah ini. Sementara sektor konstruksi memberikan kontribusi Rp71,72 triliun atau 10,80 persen, didorong oleh pembangunan infrastruktur fisik, perumahan, dan fasilitas publik yang terus berlanjut. Sektor jasa lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar meliputi informasi dan komunikasi sebesar Rp19,91 triliun, jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp14,17 triliun, real estat sebesar Rp19,50 triliun, serta jasa pendidikan sebesar Rp14,30 triliun.



Gambar 1.10 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan peranan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2024, tiga lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar adalah pertambangan dan penggalian, diikuti oleh Industri Pengolahan kemudian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2024 peranan masing masing lapangan usaha di atas secara berurutan adalah 24,60 persen, 18,27 persen, dan 13,56 persen. Pada tahun 2024, total pengeluaran komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, LNPRT/NPISH dan konsumsi pemerintah mencapai 461,63 triliun rupiah.

Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga kabupaten/kota yang memberikan peranan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2024, tiga kabupaten/kota yang memberikan sumbangan terbesar adalah Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan peranan masing-masing secara berurutan adalah 30,75 persen, 17,24 persen, dan 13,69 persen. Namun bila melihat dari laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2024, tiga kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah secara berurutan adalah Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, dan Kota Pagar Alam dengan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 4,70 persen, 4,39 persen, dan 4,09 persen.

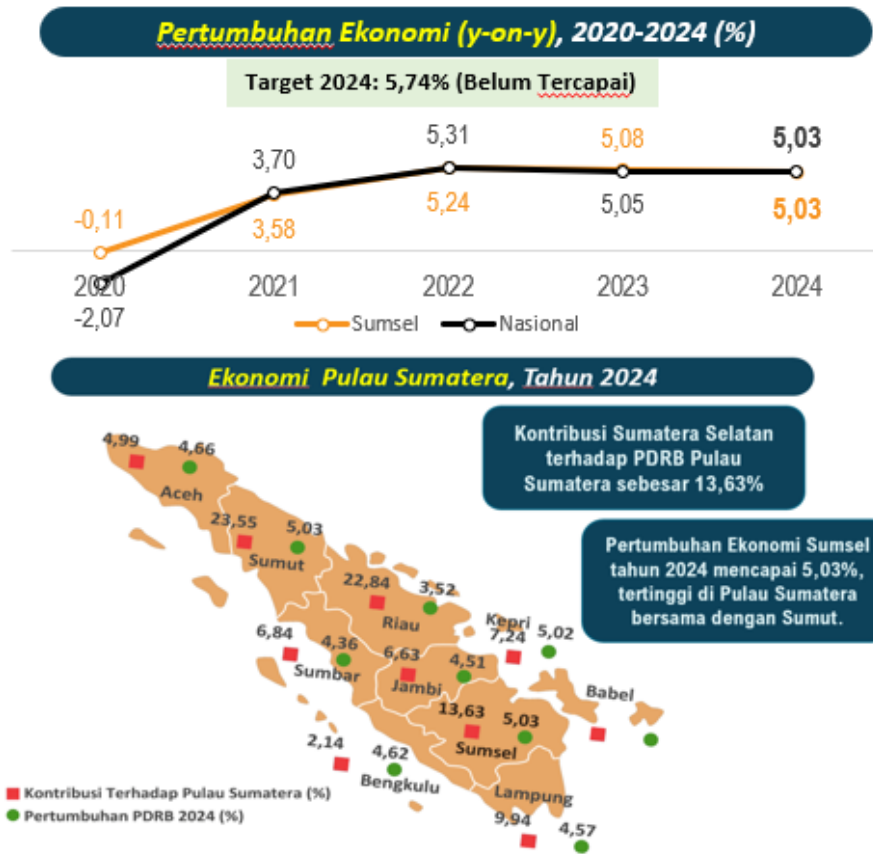
2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan 2010) provinsi-provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan secara umum menunjukkan penurunan pada tahun 2024, kecuali provinsi Lampung dan Bengkulu yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dibanding tahun 2023. Berdasarkan urutan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, provinsi Sumatera Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,03 persen. kemudian diikuti provinsi Bengkulu dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62 persen, Lampung sebesar 4,57 persen, Jambi sebesar 4,51 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung 0,77 persen. Inflasi di 90 kota di Indonesia dapat dilihat pada tabel 14.3. Ada 4 kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi kota IHK yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 984,24 ribu jiwa pada tahun 2024. Angka ini masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah penduduk miskin 69,95 juta jiwa. Kemajuan pembangunan manusia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024 di wilayah Sumatera bagian selatan, provinsi dengan capaian tertinggi dalam pembangunan manusia adalah Bengkulu (74,91) dan diikuti Kepulauan Bangka Belitung (74,55), Jambi (74,36), dan Sumatera Selatan (73,84). Sedangkan Provinsi Lampung menempati urutan terendah (73,13).

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan stabil pasca pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,11 persen akibat dampak pandemi, namun kembali pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,58 persen, meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022, 5,08 persen pada 2023, dan 5,03 persen pada 2024. Meskipun target pertumbuhan 2024 sebesar 5,74 persen belum tercapai, laju pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,03 persen.

Kontribusi Sumatera Selatan terhadap PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2024 mencapai 13,63 persen, menempatkannya sebagai salah satu kontributor terbesar bersama Provinsi Sumatera Utara. Dari sisi struktur ekonomi, PDRB berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 24,60 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 18,27 persen, perdagangan besar dan eceran 13,85 persen, pertanian 13,56 persen, serta konstruksi 10,80 persen. Dari sisi pertumbuhan sektoral, sektor jasa keuangan tumbuh paling tinggi yaitu 9,39 persen, diikuti real estat 9,35 persen, jasa perusahaan 8,18 persen, serta informasi dan komunikasi 8,17 persen.



Gambar 1.11 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Secara keseluruhan, meskipun target pertumbuhan ekonomi 2024 belum sepenuhnya tercapai, kinerja perekonomian Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan yang solid pasca pandemi, ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, dengan kontribusi konsumsi domestik yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2. 1

Kondisi capaian SPM bidang Pendidikan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pendidikan Provinsi							
	Pendidikan Menengah			Pendidikan Khusus			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Menengah			Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Khusus				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Selatan	422304	417165	98.78	4232	2798	66.12	1,149,964,840,599	1,022,572,562,063

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2. 2

Kondisi capaian SPM bidang Kesehatan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah Orang terlayani				Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah Orang terlayani			
Sumatera Selatan	6917	6917	100	926,250,000	781,363,699	38051	38051	100	570,176,000	68,475,100

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 3

Kondisi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota				
	Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota				
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Selatan	0	0	100%	0	0	100%	1.350.040.972,-	1.186.689.111,-

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 4
Kondisi capaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi				
	Warga Negara yang korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Selatan	0	0	100	0	0	100	347,725,985	335,789,135

2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 5

Kondisi capaian SPM bidang Trantibumlinmas di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah orang terlayani	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(17)	(18)
Sumatera Selatan	100	100	100	1,984,407,500	1,980,263,211

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2. 6
Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Program Rahabilias Sosial										Program Penanganan Bencana								
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)				
Sumatera Selatan	20	20	100	130	130	100	200	200	100	180	180	100	7428	7428	100	7,354,501,350	7,327,802,033		

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

2.2.1 Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pendidikan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Data tidak valid/terintegrasi (Dapodik, Dukcapil, e-SPM belum sinkron)

Data pendidikan yang digunakan dalam perencanaan SPM masih belum sinkron antara Dapodik (data sekolah dan peserta didik), Dukcapil (data kependudukan), dan e-SPM (aplikasi pemantauan SPM). Ketidaksesuaian ini mengakibatkan data jumlah siswa, kebutuhan guru, dan kondisi sarana prasarana tidak akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran sering tidak tepat sasaran.

- b. Anggaran belum fokus menutup gap indikator SPM

Alokasi anggaran pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota belum sepenuhnya diarahkan untuk menutup kekurangan (gap) capaian indikator SPM, seperti pemerataan fasilitas belajar, peningkatan mutu guru, dan akses layanan pendidikan. Akibatnya, meskipun anggaran pendidikan tersedia, realisasi capaian indikator SPM tidak optimal.

- c. Kesenjangan akses pendidikan (PAUD, kesetaraan, daerah terpencil)

Layanan pendidikan dasar masih belum merata, terutama pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan di daerah terpencil atau perbatasan. Faktor jarak, keterbatasan transportasi, dan minimnya fasilitas pendidikan membuat sebagian anak tidak terlayani sesuai standar minimal.

- d. Kualitas SDM guru/kepsek belum merata

Distribusi guru dan kepala sekolah berkualitas masih timpang antarwilayah. Banyak guru belum memiliki sertifikasi atau pelatihan kompetensi terkini, sedangkan di beberapa sekolah terpencil, kepala sekolah merangkap tugas lain karena kekurangan tenaga. Hal ini berdampak pada mutu layanan pendidikan.

- e. Koordinasi lintas OPD lemah dan Tim Pokja SPM kurang aktif
Perangkat daerah terkait (pendidikan, kesehatan, sosial, dukcapil, bappeda) belum memiliki mekanisme koordinasi yang efektif untuk penerapan SPM. Tim Pokja SPM yang seharusnya memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM belum berfungsi optimal, sehingga penanganan masalah sering terlambat.
- f. Sosialisasi dan pengaduan publik minim
Informasi mengenai SPM pendidikan dan hak masyarakat masih jarang disosialisasikan. Selain itu, mekanisme pengaduan publik terkait layanan pendidikan belum terintegrasi dan tidak semua pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi layanan masih rendah.
- g. Indikator pusat belum disesuaikan kondisi lokal
Indikator SPM yang ditetapkan pemerintah pusat seringkali tidak mempertimbangkan sepenuhnya karakteristik daerah, seperti kondisi geografis, ketersediaan SDM, dan sarana prasarana. Tanpa penyesuaian lokal, target capaian menjadi sulit direalisasikan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses.

2.2.2 Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Dalam SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Kesehatan terkait Bencana dan Keadian Luar Biasa (KLB) dalam melakukan Perkiraan lokasi teradinya bencana dan jumlah yang terdampak bencana untuk penyusunan sasaran masih menggunakan data keluarga miskin Provinsi Sumatera Selatan (By Name By Address) yang bersumber dari BAPEDDA Sumsel Tahun 2024, sedangkan dan belum ada update data keluarga miskin untuk tahun 2025.
- b. Kesulitan dalam menyusun peta resiko KLB dikarenakan KLB yang terjadi saat ini masih dalam lingkup Kabupaten/ Kota yang ditangani Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota setempat, sehingga

dalam penyusunan target KLB Provinsi masih menggunakan data KLB Kab/ Kota.

- c. Pada saat pasca bencana/ KLB, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk yang terdampak bencana dan/atau KLB karena kesulitan dalam menentukan jumlah penduduk yang terdampak bencana/KLB.

2.2.3 Pekerjaan Umum

Dalam Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota masih mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a. Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai SPAM Regional dan SPALD Regional.
- b. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Regional) belum dapat dilaksanakan karena jarak antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya SPAM Regional, begitu juga dengan SPALD Regional (lebih efisien dengan metode gravitasi).
- c. Kondisi saat ini pembangunan SPAM Regional dirasakan belum efisien dan efektif mengingat masing-masing kabupaten/kota memiliki BUMD Air Minum (Perumda/PDAM) yang dapat mencakup pelayanan wilayahnya serta terdapat sungai/anak sungai yang melintas antar kabupaten/kota yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat setempat.
- d. Untuk pemenuhan air minum di wilayah perbatasan, disarankan untuk melakukan kerjasama antar daerah (KAD).
- e. Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan SPAM Regional dan SPALD Regional.

2.2.4 Perumahan Rakyat

Dalam bidang Perumahan Rakyat masih mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a. Data rumah tidak layak huni (RTLH) belum valid dan terintegrasi Data RTLH yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, pemerintah kabupaten/kota, dan sumber data nasional seperti DTKS serta P3KE masih belum sinkron. Perbedaan kriteria dan metode pendataan menyebabkan jumlah RTLH yang tercatat tidak konsisten, sehingga menghambat penetapan prioritas penerima bantuan secara tepat sasaran.
- b. Anggaran penanganan RTLH terbatas dan belum fokus menutup gap SPM
Ketersediaan dana untuk renovasi atau pembangunan rumah layak huni masih minim dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Anggaran yang ada pun sebagian belum diarahkan secara khusus untuk memenuhi indikator SPM, sehingga capaian rumah layak huni tidak meningkat signifikan setiap tahunnya.
- c. Kesenjangan akses bantuan, terutama di wilayah terpencil, perdesaan, dan daerah perairan
Masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau seringkali tidak mendapatkan bantuan perumahan karena keterbatasan akses transportasi, biaya logistik material, dan minimnya informasi terkait program. Akibatnya, ketimpangan kualitas hunian antarwilayah semakin lebar.
- d. Kualitas bangunan dan lingkungan hunian rendah
Beberapa bantuan rumah layak huni yang telah diberikan belum memenuhi standar teknis konstruksi atau tidak memperhatikan kelayakan lingkungan, seperti sanitasi, ventilasi, dan akses air bersih. Kelemahan pengawasan teknis dan kurangnya pendampingan menjadi faktor penyebabnya.
- e. Koordinasi lintas sektor lemah
Dinas perumahan, dinas sosial, dinas PU, lingkungan hidup, serta perangkat daerah lainnya belum memiliki mekanisme kerja terpadu untuk penanganan RTLH. Hal ini menyebabkan program sering berjalan parsial, tidak terintegrasi, dan kurang efektif.

- f. Minimnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak swasta. Pelibatan masyarakat dalam proses pendataan, pembangunan, dan pemeliharaan rumah masih rendah. Selain itu, potensi pendanaan alternatif dari CSR perusahaan, BUMN, atau lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal.
- g. Indikator pusat belum disesuaikan dengan kondisi lokal. Indikator SPM bidang perumahan dari pemerintah pusat seringkali tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial ekonomi wilayah, misalnya daerah rawa atau perairan yang membutuhkan desain dan material khusus. Akibatnya, target capaian sulit dicapai tanpa modifikasi indikator dan strategi di tingkat provinsi.

2.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Regulasi (Peraturan Perundang-undangan)
 - 1. Tumpang tindih peraturan antara Perda/Perkada dengan peraturan pusat atau sektoral.
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
 - 1. Kurangnya personil Satpol PP atau penegak lainnya yang memiliki kompetensi dalam pemahaman hukum.
 - 2. Belum Maksimalnya pelatihan teknis, seperti teknik penegakan hukum, komunikasi, penggunaan teknologi dan penyuluhan masyarakat.
- c. Aspek Anggaran
 - 1. Terbatasnya anggaran operasional dalam rangka penegakan perda dan perkada.
- d. Aspek Sosial dan Budaya
 - 1. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap isi dan pentingnya Perda/Perkada.

2. Budaya permisif terhadap pelanggaran Perda (misalnya, ketidakpedulian terhadap kebersihan, ketertiban, atau perizinan).
 3. Adanya konflik kepentingan politik atau ekonomi yang melindungi pelanggar Perda.
- e. Aspek Sosialisasi dan Informasi
1. Belum maksimalnya sosialisasi Perda/Perkada kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- f. Aspek Penegakan Hukum
1. Intervensi dari pihak tertentu (misalnya elite politik atau pemilik modal).
- g. Sarana dan Prasarana
1. Belum adanya kendaraan mobil double cabin untuk menjangkau lokasi yang tidak bisa dilewati mobil biasa.
 2. Kendaraan Operasional yang memadai.
 3. Senjata Api untuk bela diri bagi PPNS dalam penegakan perda dan perkada.
 4. Belum adanya Fasilitas Sekretariat PPNS yang memadai, Seperti ;
 - Kursi
 - Meja
 - Komputer

2.2.6 Sosial

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Sarana dan Prasarana
1. Keterbatasan fasilitas pelayanan sosial tingkat provinsi, yaitu berupa UPTD Panti Sosial, baik dari sisi kapasitas daya tampung, maupun kualitas sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS lintas kabupaten/kota yang membutuhkan layanan.
 2. Kondisi fisik sebagian panti sosial masih belum memenuhi standar layanan minimal, sudah banyak gedung yang perlu diperbaiki termasuk kurangnya fasilitas khusus untuk

kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, atau anak terlantar.

3. Minimnya sarana pendukung layanan yang lainya seperti Ruang Konseling/Terapi, Ruang Kesehatan dll.

b. Permasalahan Anggaran

1. Belum optimalnya alokasi anggaran APBD Provinsi untuk mendukung pelaksanaan SPM secara menyeluruh, terutama untuk pembiayaan operasional panti sosial, Perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan, serta pembinaan dan penguatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM.

2. Belum adanya pembiayaan yang memadai untuk sistem koordinasi dan supervisi lintas daerah, padahal peran provinsi penting dalam mengonsolidasikan layanan sosial antar kabupaten/kota.

3. Prioritas anggaran seringkali tidak sepenuhnya berpihak pada urusan sosial, mengingat SPM bidang sosial masih kurang mendapatkan perhatian dibandingkan sektor layanan dasar lainnya seperti pendidikan dan Kesehatan dan juga tidak ada dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK atau yang lainnya.

c. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

1. Jumlah dan kualifikasi SDM pada UPTD Panti Sosial Provinsi masih terbatas, terutama tenaga profesional seperti pekerja sosial, psikolog, terapis, dan pendamping sosial yang dibutuhkan untuk memberikan layanan berkualitas.

2. Minimnya pelatihan dan penguatan kapasitas teknis SDM, baik bagi petugas di tingkat provinsi maupun pembina teknis kabupaten/kota, dalam implementasi SPM sesuai indikator dan standar operasional prosedur (SOP).

3. Beban kerja yang tinggi pada SDM yang ada, terutama dalam menangani PPKS lintas kabupaten/kota dengan kompleksitas kasus yang lebih tinggi, tanpa dukungan tim lintas disiplin yang memadai.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1 SPM Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) SMA	1	Kemampuan literasi	Nilai
			2	Kemampuan numerasi	Nilai
			3	Indeks iklim keamanan	Nilai
			4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai
			5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai
		Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) SMK	1	Kemampuan literasi	Persentase
			2	Kemampuan numerasi	Persentase
			3	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai
			4	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai
			5	Indeks iklim keamanan	Persentase
			6	Indeks iklim kebhinekaan	Persentase
			7	Indeks iklim inklusivitas	Nilai
			8	Indeks iklim keamanan	Nilai
2	Program SPM Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun)	1	Indeks iklim keamanan	Nilai
			2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai
			3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	
1	2	3	4		5	
	Khusus	Penyandang Disabilitas SDLB	4	Kemampuan literasi	Nilai	
			5	Kemampuan numerasi	Nilai	
			Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas SMPLB	1	Indeks iklim keamanan	Nilai
				2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai
				3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai
		4		Kemampuan literasi	Nilai	
		5	Kemampuan numerasi	Nilai		
		Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas SMALB	1	Indeks iklim keamanan	Nilai	
			2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	
			3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	
			4	Kemampuan literasi	Nilai	
			5	Kemampuan numerasi	Nilai	

3.1.2 SPM Bidang Kesehatan

Tabel 3. 2

Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Pra Krisis Kesehatan	1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang
			2	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang
			3	Sarana dan prasarana	unit
		Tahap tanggap darurat	1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang
			2	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang
			3	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang
			4	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang
			5	Tenaga medis : Dokter	Orang
			6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang
			7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang
			8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang
			10 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang
			11 Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang
			12 Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Kondisi Berpotensi KLB	1 Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	unit
			2 Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket
			3 Wadah pengiriman spesimen /Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	unit
			4 Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	unit
			5 Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir
			6 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	unit
			7 Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	unit
			8 Tenaga medis : Dokter	Orang
			9 Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang
			10 Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang
			11 Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			12	Tenaga Laboratorium	Orang
			13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang
			14	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang
		KONDISI TERJADI KLB	1	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3. 3
Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	SPAM Lintas Regional	1	Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik
			2	Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik
		Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	1	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah
			2	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota	1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga
			2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga
			3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga
		Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota	1	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah
			2	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota

3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3. 4
Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Terjadi Bencana	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah
			2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah
			3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah
		Tidak Terjadi Bencana	1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana) Ada Relokasi Program Pemerintah	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah
			2	Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah
			3	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah
			4	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah
		Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah	1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota

**3.1.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Pelindungan Masyarakat**

Tabel 3. 5
Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit
			2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen
			3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	orang
			4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen
			5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang

3.1.6 SPM Bidang Sosial

Tabel 3. 6
Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Selatan Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang
			2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang
			3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit
			4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan /olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang
			11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	2	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang
			4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang
			6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym , bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang
			11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang
			2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang
			3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit
			4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang
			9 Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang
			10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang
			11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang
			12 Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang
		Ada Gepeng	2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang
			3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang
			4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang
			6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang
		Terjadi Bencana	2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%	1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.7 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Menengah										
	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	98.78	432,862				358,308,472,728	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdas men
	SMA										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	66.93			64.57		526,676,832,660	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdas men, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	58.24			54.33	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru				
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45			87.64	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.01			86.96	Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.76			85	Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				
	SMK										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	65.09			62.41		365,503,686,140	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.82			52.95			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		men, Satuan Pendidikan
3)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80.89			82.54					
4)	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85.06			79.05					
5)	Indeks iklim keamanan	Persentase	69.07			86.04					
6)	Indeks iklim kebhinekaan	Persentase	69.25			85.33					
7)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.03			82.26					
2	Pendidikan Khusus										
	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	66.12	10,667				4,382,140,000	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdas men

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SDLB										
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.2			86.58		22,664,965,675.00	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdas men, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.67			93.02			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67			81.40			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	58.06			62.84			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.65			48.56			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
	SMPLB										
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			77.46		22,664,965,675.00	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdas men, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.41			72.86			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.12			82.26			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	64.8			62.51		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.73			56.48		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
	SMALB										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	60.41			57.51			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdas men, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.18			52.42		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	74			78.27		Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa			
4)	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	70.8			67.69		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65.2			79.93		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Menengah										
	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	98.78	443,684				361,492,500,000	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemdik dasmen
	SMA									APBD, DAU SG, DAK	
1)	Kemampuan literasi	Nilai	66.93			64.62		529,784,939,000	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendik dasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	58.24			54.38	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru				
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45			87.69	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.01			87.01	Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.76			85			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
	SMK										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	65.09			62.46		420,171,120,000	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendik dasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.82			53.00			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
3)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80.89			82.59			Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi		
4)	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85.06			79.10			Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi		
5)	Indeks iklim keamanan	Persentase	69.07			86.09			Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa		
6)	Indeks iklim kebhinekaan	Persentase	69.25			85.38			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			77.51			Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendik dasmen, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.41			72.91		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.12			82.31		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
4)	Kemampuan literasi	Nilai	64.8			62.56		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.73			56.53		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
	SMALB										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	60.41			57.56			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendik dasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.18			52.47		Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru			
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	74			78.32		Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa			
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.8			67.74		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65.2			79.98		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pendidikan Menengah										
	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	98.78	454,776				408,965,050,000	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdasmen
	SMA										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	66.93			69.24		592,921,453,900	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	58.24			62.10	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45			71.45			Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa			
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.01			72.01		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.76			60		Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				
SMK												
1)	Kemampuan literasi	Nilai	65.09			67.40		437,876,182,000	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan	
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.82			60.64						Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru
3)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80.89			82.59						Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi
4)	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85.06			88.04						Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis,

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.2			77.20		25,846,195,000.00	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.67			71.67			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67			68.00			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	58.06			60.06			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.65			60.67			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
	SMPLB										
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			70		25,846,195,000.00	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.41			73.41			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.12			69.12			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	64.8			67.04			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.73			58.93			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	98.78	466,145				447,984,855,000	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdasmen
	SMA										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	66.93			71.55		650,325,424,290	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	58.24			65.96	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru				
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45			72.45	Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.01			73.01	Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.76			61	Kegiatan perundungan, Kegiatan				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
									Penguatan karakter siswa		
	SMK										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	65.09			69.71		478,790,250,200	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.82			64.46			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
3)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80.89			84.29			Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi		
4)	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85.06			91.02			Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik,		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
									Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi		
5)	Indeks iklim keamanan	Persentase	69.07			71.07			Kegiatan perundungan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Penguatan karakter siswa		
6)	Indeks iklim kebhinekaan	Persentase	69.25			71.25			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
7)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.03			59.03			Kegiatan perundungan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
2	Pendidikan Khusus										
	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	66.12	11,487				5,326,518,558	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdasmen

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			71			Kegiatan perundingan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.41			74.41			Kegiatan perundingan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.12			70.12			Kegiatan perundingan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	64.8			69.28			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.73			60.13			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
	SMALB										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	60.41			66.11			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.18			61.89			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	74			76.00			Kegiatan perundangan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa		
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.8			72.80		Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65.2			67.20		Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pendidikan Menengah										
	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	98.78	477,799				490,906,640,500	1. SMPB jalur Afirmasi 2. Sekolah Khusus Anak Miskin 3. Pendataan ATS 4. Biaya operasional Pembelajaran 5. Penambahan USB 6. Penambahan RKB 7. Rehabilitasi Ruang Kelas	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Disdukcapil, BPS, Kemendikdasmen
	SMA										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	66.93			73.86		713,969,791,719	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	58.24			69.82	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru				
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45			73.45	Kegiatan perundangan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
									Pengutan karakter siswa		
4)	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	71.01			74.01			Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.76			62			Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
	SMK										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	65.09			72.02		523,870,725,220	Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.82			68.28			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
3)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80.89			85.98			Penyelarasan Kurikulum, Pengadaan fasilitas modern sesuai standar DUDI, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan teknis, magang dan praktik, Bursa kerja khusus, Sertifikasi kompetensi		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Indeks iklim keamanan	Nilai	69			72			Kegiatan perundangan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.41			75.41			Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
3)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.12			71.12			Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa		
4)	Kemampuan literasi	Nilai	64.8			71.52			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.73			61.33			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		
	SMALB										
1)	Kemampuan literasi	Nilai	60.41			68.96			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru	APBD, DAU SG, DAK	Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57.18			64.25			Pelajaran Mendalam, Pelatihan peningkatan kompetensi siswa dan guru		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	74			77.00			Kegiatan perundangan, Pengadaan CCTV, Pembangunan Pagar , Kegiatan Pengutan karakter siswa		
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.8			73.80		Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65.2			68.20		Kegiatan perundangan, Kegiatan Penguatan karakter siswa			

Tabel 3.8 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			248.927		248.927		761.718.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan
	Pra Krisis Kesehatan										
1)	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	2024	248.927		248.927					
2)	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	2024	30		30					
3)	Sarana dan prasarana	unit	2024	17		17					
	Tahap tanggap darurat										
1)	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	2024	248.927		248.927					
2)	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	2024	4.838		4.838					
3)	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis	Orang	2024	3.350		3.350					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)										
4)	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	2024	248.927		248.927					
5)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	249		249					
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2024	498		498					
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2024	597		597					
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2024	249		249					
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2024	1		1					
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2024	52		52					
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2024	87		87					
12)	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	2024	12		12					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			29.671		29.671		906.706.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan
	Kondisi Berpotensi KLB										
1)	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	2024	20		20					
2)	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	2024	150		150					
3)	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	2024	25		25					
4)	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	2024	20		20					
5)	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	2024	40		40					
6)	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	2024	30		30					
7)	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	2024	17		17					
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	30		30					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2024	30		30					
10)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2024	10		10					
11)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2024	2		2					
12)	Tenaga Laboratorium	Orang	2024	10		10					
13)	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2024	1		1					
14)	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2024	7		7					
	KONDISI TERJADI KLB										
1)	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	2024	15		15					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			263.863		263.863		800.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
	Pra Krisis Kesehatan										
1)	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	2024	263.863		263.863					
2)	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	2024	30		30					
3)	Sarana dan prasarana	unit	2024	17		17					
	Tahap tanggap darurat										
1)	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	2024	263.863		263.863					
2)	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	2024	5.129		5.129					
3)	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	2024	3.551		3.551					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
4)	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	2024	263.863		263.863					
5)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	264		264					
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2024	528		528					
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2024	633		633					
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2024	264		264					
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2024	1		1					
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2024	55		55					
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2024	92		92					
12)	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	2024	13		13					
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			31.451		31.451		500.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kondisi Berpotensi KLB										
1)	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	2024	21		21					
2)	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	2024	159		159					
3)	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	2024	27		27					
4)	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	2024	21		21					
5)	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	2024	42		42					
6)	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	2024	32		32					
7)	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	2024	18		18					
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	31		31					
9)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2024	31		31					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
10)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2024	11		11					
11)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2024	2		2					
12)	Tenaga Laboratorium	Orang	2024	11		11					
13)	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2024	1		1					
14)	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2024	7		7					
	KONDISI TERJADI KLB										
1)	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	2024	15		15					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			279.694		279.694		800.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
	Pra Krisis Kesehatan										
1)	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	<i>Orang</i>	2024	279.694		279.694					
2)	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	<i>Orang</i>	2024	30		30					
3)	Sarana dan prasarana	<i>unit</i>	2024	17		17					
	Tahap tanggap darurat										
1)	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	279.694		279.694					
2)	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	5.436		5.436					
3)	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	3.764		3.764					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
4)	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	2024	279.694		279.694					
5)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	280		280					
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2024	559		559					
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2024	671		671					
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2024	280		280					
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2024	1		1					
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2024	59		59					
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2024	98		98					
12)	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	2024	14		14					
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			33.338		33.338		500.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
	Kondisi Berpotensi KLB										
1)	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	2024	22		22					
2)	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	2024	169		169					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
3)	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	2024	28		28					
4)	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	2024	22		22					
5)	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	2024	45		45					
6)	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	2024	34		34					
7)	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	2024	19		19					
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	33		33					
9)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2024	33		33					
10)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2024	12		12					
11)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2024	2		2					
12)	Tenaga Laboratorium	Orang	2024	12		12					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
13)	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2024	1		1					
14)	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2024	7		7					
	KONDISI TERJADI KLB										
1)	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	2024	15		15					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			296.476		296.476		800.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
	Pra Krisis Kesehatan										
1)	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	<i>Orang</i>	2024	296.476		296.476					
2)	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	<i>Orang</i>	2024	30		30					
3)	Sarana dan prasarana	<i>unit</i>	2024	17		17					
	Tahap tanggap darurat					-					
1)	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	296.476		296.476					
2)	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	5.762		5.762					
3)	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	<i>Orang</i>	2024	3.990		3.990					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
4)	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	2024	296.476		296.476					
5)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	296		296					
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2024	593		593					
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2024	712		712					
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2024	296		296					
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2024	1		1					
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2024	62		62					
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2024	104		104					
12)	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	2024	15		15					
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			35.339		35.339		500.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kondisi Berpotensi KLB										
1)	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	2024	24		24					
2)	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	2024	179		179					
3)	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	2024	30		30					
4)	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	2024	24		24					
5)	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	2024	48		48					
6)	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	2024	36		36					
7)	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	2024	20		20					
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	35		35					
9)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2024	35		35					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
10)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2024	12		12					
11)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2024	2		2					
12)	Tenaga Laboratorium	Orang	2024	12		12					
13)	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2024	1		1					
14)	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2024	7		7					
	KONDISI TERJADI KLB										
1)	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	2024	15		15					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			314.265		314.265		800.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan
	Pra Krisis Kesehatan										
1)	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	2024	314.265		314.265					
2)	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	2024	30		30					
3)	Sarana dan prasarana	unit	2024	17		17					
	Tahap tanggap darurat		2024								
1)	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	2024	314.265		314.265					
2)	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	2024	6.109		6.109					
3)	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	2024	4.229		4.229					
4)	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	2024	314.265		314.265					
5)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	314		314					
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2024	629		629					
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2024	754		754					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2024	314		314					
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2024	1		1					
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2024	66		66					
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2024	110		110					
12)	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	2024	16		16					
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			37.459		37.459		500.000.000		APBD Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan
	Kondisi Berpotensi KLB										
1)	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	2024	25		25					
2)	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	2024	189		189					
3)	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	2024	32		32					
4)	Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	2024	25		25					
5)	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	2024	50		50					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6)	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	2024	38		38					
7)	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	2024	21		21					
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	2024	37		37					
9)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2024	37		37					
10)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2024	13		13					
11)	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2024	2		2					
12)	Tenaga Laboratorium	Orang	2024	13		13					
13)	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	2024	1		1					
14)	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2024	7		7					
	KONDISI TERJADI KLB					-					
1)	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	2024	15		15					

Tabel 3.9 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang		-	-			(Belum ada data)	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										
1)	SPAM Lintas Regional										
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
2)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100%	0	(Belum ada data)	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Rupiah	9,082,399,000			100%	0	(Belum ada data)	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	BPKAD Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	34,000,000,000					(Belum ada data)	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	BPKAD Sumsel
2)	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	17			100%	0%	1,773,624,069	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang		-	-			4,800,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										
1)	SPAM Lintas Regional										
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
2)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	34,000,000,000					10,000,000,000			
2)	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	17			100	-	1,100,000,000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang		-	-			7,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										
1)	SPAM Lintas Regional										
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	-			-	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	-			-	-	-	Provinsi Sumsel	-	Dinas Perkim Sumsel
2)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	34,000,000,000					10,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
2)	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	17			100	-	1,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang		4,000	-			7,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										
1)	SPAM Lintas Regional										
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	-			100	-	1,500,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	-			100	-	1,500,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
2)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	34,000,000,000					10,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
2)	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	17			100	-	150,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang		2,000	-			7,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										
1)	SPAM Lintas Regional										
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	-			100	-	1,500,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	-			100	-	1,500,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
2)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	9,082,399,000			100	-	3,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
1)	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	34,000,000,000					10,000,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel
2)	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	17					150,000,000	Provinsi Sumsel	APBD Sumsel	Dinas Perkim Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ada Relokasi Program Pemerintah										
1)	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2)	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2024			100		Rp.20.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	2024			100		Rp.760.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ada Relokasi Program Pemerintah										
1)	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2)	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2024			100		Rp.500.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	2024			100		Rp.760.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ada Relokasi Program Pemerintah										
1)	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2)	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2024			100		Rp.500.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	2024			100		Rp.760.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ada Relokasi Program Pemerintah										
1)	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2)	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2024			100		Rp.500.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	2024			100		Rp.760.000.000	Provinsi Sumatera Selatan	APBD Provinsi Sumatera Selatan	Disperkim Sumatera Selatan

Tabel 3.11 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	<i>Orang</i>									
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	611	12	12	12	12	256.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	2	2	2	2	2	9.385.000	Sat pol PP	APBD	Sat Pol PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	<i>orang</i>	83 diksar polpp	3	3	0	0	20.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	N/a	0	0	0	0	0	-	-	-
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	<i>orang</i>	N/a	0	0	0	0	0	-	-	-
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	<i>orang</i>	N/a	0	0	0	0	0	-	-	-

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	<i>Orang</i>									
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	611	0	0	0	0	0	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	2	1	1	1	0	50.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	<i>orang</i>	83 diksar polpp	0	0	10	0	100.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	N/a	4	4	100%	0	30.000.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	N/a	1	1	100%		7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	N/a	1	1	100%		7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	<i>Orang</i>									
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	611	10	10	10	10	350.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	2	0	0	0	0	0	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	<i>orang</i>	83 diksar polpp	0	0	10	0	100.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	N/a	0	0	100%	0	30.000.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	<i>Orang</i>									
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	611	0	0	1	0	199.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	2	0	0	0	0	0	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	<i>orang</i>	83 diksar polpp	0	0	10	0	100.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	N/a	4	4	100%	0	30.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	<i>Orang</i>									
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	611	0	0	6	0	180.000.000	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	2	0	0	0	0	0	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	<i>orang</i>	83 diksar polpp	0	0	0	0	0	Sat Pol PP	APBD	Sat Pol PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	N/a	4	4	100%	0	30.000.000	Sat Pol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Satpol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	N/a	1	1	100%	0	7.500.000	Satpol PP	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang							BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										
1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%		BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	500		100%	100%	100%	1.700.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
1	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase penyelesaian Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	orang	120		100%	100%	100%	200.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1200		100%	100%	100%	600.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	1.004.097.129	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
6	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	3579		100%	100%	100%	461.260.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana										
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jam	12		100%	100%	100%	50.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Jam	12		100%	100%	100%	2.000.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	orang	65		100%	100%	100%	3.154.097.129	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap Kejadian	orang	218334		100%	100%	100%	50.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

	Bencana										
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang							BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										
1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	250.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	500		100%	100%	100%	2.100.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
1	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase penyelesaian Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	300.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	orang	120		100%	100%	100%	300.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1200		100%	100%	100%	800.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	2.400.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
6	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	3579		100%	100%	100%	1.500.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana										
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jam	12		100%	100%	100%	50.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Jam	12		100%	100%	100%	1.611.392.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	orang	65		100%	100%	100%	4.186.392.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	75.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang							BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										
1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	325.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	500		100%	100%	100%	2.730.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
1	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	130.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase penyelesaian Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	390.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	orang	120		100%	100%	100%	390.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1200		100%	100%	100%	1.040.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	3.120.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
6	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	3579		100%	100%	100%	1.950.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana										
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jam	12		100%	100%	100%	65.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Jam	12		100%	100%	100%	2.094.809.600	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	orang	65		100%	100%	100%	5.442.309.600	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	97.500.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
---	---	-------	--------	--	------	------	------	------------	------	------	-------------------

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang							BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										
1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	422.500.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	500		100%	100%	100%	3.549.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
1	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	169.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase penyelesaian Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	507.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	orang	120		100%	100%	100%	507.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1200		100%	100%	100%	1.352.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	4.056.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
6	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	3579		100%	100%	100%	2.535.000.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana										
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jam	12		100%	100%	100%	84.500.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Jam	12		100%	100%	100%	2.723.252.480	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

3	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	orang	65		100%	100%	100%	7.075.002.480	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	126.750.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>	<i>44</i>
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang							BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										
1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	549.250.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	500		100%	100%	100%	4.613.700.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
1	Persentase penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	219.700.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase penyelesaian Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Sampai dinyatakan sah/legal	dokumen	1		100%	100%	100%	659.100.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
3	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	orang	120		100%	100%	100%	659.100.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1200		100%	100%	100%	1.757.600.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	orang	218334		100%	100%	100%	5.272.800.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
6	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	orang	3579		100%	100%	100%	3.295.500.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana										
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jam	12		100%	100%	100%	109.850.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Jam	12		100%	100%	100%	3.540.228.224	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

3	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	<i>orang</i>	65		100%	100%	100%	9.197.503.224	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	<i>orang</i>	218334		100%	100%	100%	164.775.000	BPBD	APBD	BPBD Prov. SUMSEL

Tabel 3.12 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	25	25	-	25	-	1.038.385.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	25	25	-	25	-	252.375.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	25	25	-	25	-	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	25	25	-	25	-	250.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	-	25	-	187.000.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	-	25	-	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	212.510.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	50.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	-	25	-				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	-	25	-	29.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	-	25	-				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	-	25	-	5.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	orang	130	130	-		-	1.575.775.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	130	130							

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya /swasta)	Orang	130	130	-	130	-	1.034.775.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	130	130	-	130	-	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	130	130	-	130	-			APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	130	130	-	130	-	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130	-	366.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-		-	50.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	130	130	-		-				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	130	130	-	130	-	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	130	130	-		-				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	130	130							
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	130	130	-		-				
					-		-				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	orang	200	200	-		-	2.943.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	200	200	-	200	-	1.971.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	200	200	-	200	-	100.360.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	200	200	-	200	-	250.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	200	200	-		-	100.000.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200		200		31.640.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	200	-	360.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-		-	50.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	200	200	-		-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	200	200	-	200	-	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	200	200				5.000.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	200	200	-		-	5.000.000			
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	200	200	-	200	-	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
					-		-				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	orang	180	180	-		-	2.398.900.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng		180	180							
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	180	180	-	180	-	1.801.950.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	180	180	-	180	-	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	180	180	-	180	-	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	180	180	-	180	-	43.950.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	180	-	180	-	282.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	180	-		-	24.000.000			
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	180	180	-		-	12.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	180	180				2.500.000			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180	180	-	180	-	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	180	180	-		-	2.500.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)				-		-				
					-		-				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	orang	6.846	6.846	-		-	936.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana			6.846	-		-				
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	6.846	6.846		6.846		300.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	-	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar /alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	6.846	6.846	-	6.846	-	150.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	-	232.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	-	174.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				-		-				
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan /sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota			-		-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	25	25	-	25	0	767.375.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	25	25	-	25	0	252.375.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	25	25	-	25	0	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	25	25	-	25	0	150.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	-	25	0	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	-	25	0	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	0	240.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	0	25.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	-	25	0				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	-	25	0	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	-	25	0	5.000.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	-	25	0	5.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	orang	130	130	-	130	0	1.828.775.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	130	130		130	0	10.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	130	130	-	130	0	1.034.775.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	130	130	-	130	0	65.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	130	130	-	130	0	250.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	130	130	-	130	0	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130	0	384.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130	0	25.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	130	130	-	130	0				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	130	130	-	130	0	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	130	130	-	130	0				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	130	130		130	0	5.000.000			
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	130	130	-	130	0	0			
					-		0				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	orang	200	200	-		0	3.890.258.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	200	200	-	200	0	1.971.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	200	200	-	200	0	100.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	200	200	-		0	1.000.000.000			
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	200	200	-	200	0	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200		200	0	31.640.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	200	0	672.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-		0	25.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	200	200	-		0				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	200	200	-	200	0	5.618.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	200	200			0	5.000.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	200	200	-		0	5.000.000			
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	200	200	-	200	0	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
					-		0				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	orang	180	180	-		0	2.565.900.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng		180				0				
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	180	180	-	180	0	1.801.950.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	180	180	-	180	0	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	180	180	-		0	250.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	180	180	-	180	0	43.950.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	180	-	180	0	288.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	180	-		0	24.000.000			
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	180	180	-		0	12.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	180	180			0	1.000.000			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180	180	-	180	0	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	180	180	-		0	5.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)				-		0				
					-		0				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	orang	6.846	6.846	-	6.846	0	750.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana				-		0				
1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	6.846	6.846		6.846	0	300.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	0	100.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	6.846	6.846	-	6.846	0	150.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	0	200.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846	0	200.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				-						
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota			-						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	25		-			1.428.731.250		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	25	25	-	25	-	290.231.250		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	25	25	-	25	-	28.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	25	25	-	25	-	575.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	-	25	-	57.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	-	25	-	23.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	345.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	57.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	-	25	-	5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	-	25	-	34.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	-	25	-	5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	-	25	-	5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
					-		220	3.558.991.250			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	orang	130	130	-	130				APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	130	130		130		11.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	130	130	-	130		1.189.991.250		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	130	130	-	130		149.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	130	130	-	130		1.150.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	130	130	-	130		17.250.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		828.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		115.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	130	130	-	130		34.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	130	130	-	130		46.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	130	130	-	130		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	130	130		130		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan	Orang	130	130	-	130		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	asesmen Pekerja Sosial Profesional				-						
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	orang	200	200	-			6.048.146.700		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	200	200	-	130		2.266.650.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	200	200	-	130		230.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	200	200	-	130		2.300.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	200	200	-	130		57.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200		130		36.386.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		966.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		115.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	200	200	-	130		1.150.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	200	200	-	130		6.460.700		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	200	200		130		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	200	200	-	130		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	200	200	-	130		57.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
					-						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	orang	180	200	-			3.321.085.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng		180								
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	180	200	-	200		2.072.242.500		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	180	200	-	200		103.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	180	200	-	200		575.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	180	200	-	200		50.542.500		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		414.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		27.600.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	180	200	-	200		13.800.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	180	200		200		1.150.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180	200	-	200		57.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	180	200	-	200		5.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)			200	-						
				200	-						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	orang	6.846	6.846	-			1.495.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana				-						
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	6.846	6.846		6.846		575.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		230.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	6.846	6.846	-	6.846		230.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		230.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		230.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				-						
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota			-						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	25		-			1.643.040.938		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	25	25	-	25	-	333.765.938		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	25	25	-	25	-	33.062.500		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	25	25	-	25	-	661.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	-	25	-	66.125.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	-	25	-	26.450.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	396.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	66.125.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	-	25	-	6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	-	25	-	39.675.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	-	25	-	6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	-	25	-	6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
					-			4.092.839.938			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	orang	130	130	-	130		-		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	130	130		130		13.225.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	130	130	-	130		1.368.489.938		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	130	130	-	130		171.925.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	130	130	-	130		1.322.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	130	130	-	130		19.837.500		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		952.200.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		132.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	130	130	-	130		39.675.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	130	130	-	130		52.900.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	130	130	-	130		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	130	130		130		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan	Orang	130	130	-	130		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	asesmen Pekerja Sosial Profesional										
					-			-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	orang	200	200	-			6.955.368.705		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	200	200	-	130		2.606.647.500		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	200	200	-	130		264.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	200	200	-	130		2.645.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	200	200	-	130		66.125.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200		130		41.843.900		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		1.110.900.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		132.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	200	200	-	130		1.322.500		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	200	200	-	130		7.429.805		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	200	200		130		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	200	200	-	130		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	200	200	-	130		66.125.000		APBD	DINAS SOSIAL
					-			-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	orang	180	200	-			3.819.247.750		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng		180					-			
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	180	200	-	200		2.383.078.875		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	180	200	-	200		119.025.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	180	200	-	200		661.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	180	200	-	200		58.123.875		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		476.100.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		31.740.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	180	200	-	200		15.870.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	180	200		200		1.322.500		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180	200	-	200		66.125.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	180	200	-	200		6.612.500		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)			200	-			-			
				200	-			-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	orang	6.846	6.846	-			1.719.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana				-			-			
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	6.846	6.846		6.846		661.250.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		264.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	6.846	6.846	-	6.846		264.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		264.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	6.846	6.846	-	6.846		264.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				-						
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota			-						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	25		-			1.889.497.078		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	25	25	-	25	-	383.830.828		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	25	25	-	25	-	38.021.875		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	25	25	-	25	-	760.437.500		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	-	25	-	76.043.750		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	-	25	-	30.417.500		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	456.262.500		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	-	25	-	76.043.750		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	-	25	-	7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	-	25	-	45.626.250		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	25	25	-	25	-	7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	25	25	-	25	-	7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
					-			4.706.765.928			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	orang	130	130	-	130		-		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	130	130		130		15.208.750		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	130	130	-	130		1.573.763.428		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	130	130	-	130		197.713.750		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	130	130	-	130		1.520.875.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	130	130	-	130		22.813.125		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		1.095.030.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	130	130	-	130		152.087.500		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	130	130	-	130		45.626.250		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	130	130	-	130		60.835.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	130	130	-	130		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	130	130		130		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan	Orang	130	130	-	130		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
	asesmen Pekerja Sosial Profesional										
					-			-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	orang	200	200	-			7.998.674.011		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	200	200	-	130		2.997.644.625		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	200	200	-	130		304.175.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	200	200	-	130		3.041.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	200	200	-	130		76.043.750		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200		130		48.120.485		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		1.277.535.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	200	200	-	130		152.087.500		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	200	200	-	130		1.520.875		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	200	200	-	130		8.544.276		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	200	200		130		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	200	200	-	130		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	200	200	-	130		76.043.750		APBD	DINAS SOSIAL
					-			-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	orang	180	200	-			4.392.134.913		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng		180					-			
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	180	200	-	200		2.740.540.706		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	180	200	-	200		136.878.750		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	180	200	-	200		760.437.500		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	180	200	-	200		66.842.456		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		547.515.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	180	200	-	200		36.501.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	180	200	-	200		18.250.500		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	180	200		200		1.520.875		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180	200	-	200		76.043.750		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	180	200	-	200		7.604.375		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)			200	-			-			
				200	-			-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	orang	750	6.846	-			1.977.137.500		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana				-			-			
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang		6.846		6.846		760.437.500		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		6.846	-	6.846		304.175.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit		6.846	-	6.846		304.175.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang		6.846	-	6.846		304.175.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang		6.846	-	6.846		304.175.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				-						
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota			-						

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD sampai ke penjabaran operasionalnya Renja PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan 40 waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di cross check apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:
 - a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
 - 3) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 4) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - 5) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

2. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
3. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
 - a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

4. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - e. Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - f. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - g. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi di masing-masing Bidang/Urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian IP SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Trantibum dan Bidang Sosial. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM sampai Tahun 2029. Beberapa kendala dalam penerapan SPM di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk memenuhi kewajiban tercapainya pemenuhan SPM sebesar 100%, meskipun telah diatur dan ditetapkan bahwa pemenuhan SPM harus diprioritaskan;
2. Belum sesuainya nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM;
3. Form pendataan pada tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat dilengkapi sesuai data yang dibutuhkan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Selatan
2. Tim penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip "ketepatan sasaran" yang ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu;

4. Penguatan Tim Penerapan SPM, baik dalam fungsi koordinasi secara intensif maupun fungsi binwas yang didukung dengan alokasi pendanaan;
5. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pemenuhan SPM yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> dengan nomenklatur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis;
6. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra PD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
8. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
9. Perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organization* (NGO) yang concern terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
10. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.

11. Pemerintah Provinsi (Sekretaris Daerah) perlu terus melakukan fasilitasi implementasi SPM, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan tolak ukur SPM, baik kepada kabupaten kota maupun kepada OPD provinsi sebagai pengampu sektor/urusan wajib pelayanan dasar;
12. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan;
13. Dalam implementasi SPM perlu kiranya diteliti/diamati respon/persepsi dari penerima layanan, apakah pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ditargetkan menerima layanan (evaluasi dari *demand side*).

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Provinsi Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU